

## EXPLAINING THE FALL OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY ON WELFARE IN EAST JAVA: A HOUSEHOLD LEVEL ANALYSIS

Ririn Nopiah\*<sup>1</sup>  
Humam Rosyadi<sup>2</sup>  
Abdurakhman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Magister Ilmu Matematika, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Matematika, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

### ABSTRACT

Poverty in East Java is complex problems multidimensional. East Java Province is one of the provinces that has highest number of poverties in Java Island. The condition of poverty reflects that population welfare level and suspectable to poor. The aims of this study is to analyze the determinant socio economics to welfare in East Java by using survey data from Indonesia Family Life Survey (IFLS 5). This study was analyzed by two approach are multiple linier regression model and ordered logistic model. The results of this study shows that micro credit, years of education, social capital, infrastructure availability and assets ownership have significant effect to welfare in East Java. Demographic factors like age and number of households also shows significant result to welfare in East Java.

**Keywords:** Welfare, Per Capita Expenditure, Disparity, East Java

\*Korespondensi:  
Ririn Nopiah

E-mail:  
[economicsririn@gmail.com](mailto:economicsririn@gmail.com)

### ABSTRAK

Kemiskinan Jawa Timur merupakan problematika kompleks dan multidimensional. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Kondisi kemiskinan tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk dan rentan untuk miskin. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis determinan sosial ekonomi terhadap kesejahteraan di Jawa Timur dengan menggunakan data survei rumah tangga IFLS 5. Studi ini dianalisis melalui dua pendekatan yaitu model regresi linier berganda dan ordered logistic model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman kredit mikro, lama pendidikan yang ditempuh, modal sosial, ketersediaan infrastruktur dan kepemilikan aset memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Faktor demografi lainnya seperti umur dan jumlah anggota rumah tangga juga menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan di Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan, Pengeluaran per Kapita, Disparitas, Jawa Timur

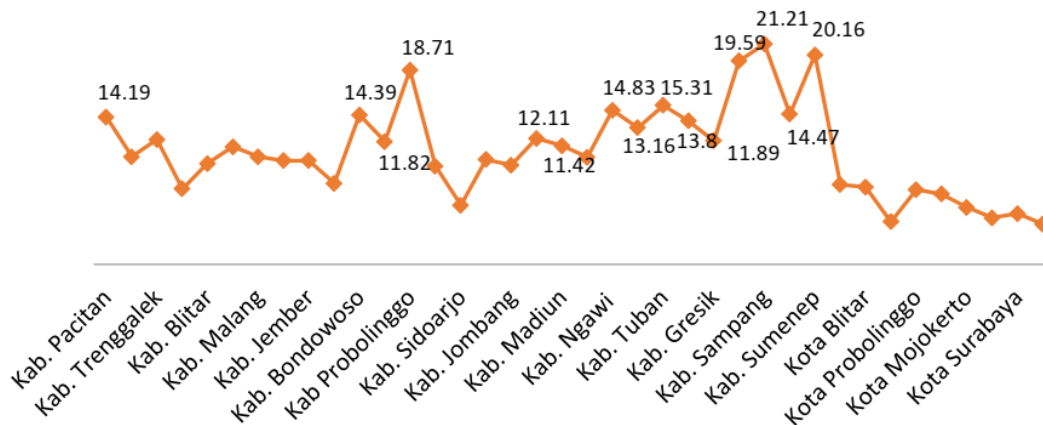
JEL: D6, D60, D63

### Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional dan kompleks yang dialami oleh sebagian masyarakat di suatu negara (Kurniawan, 2017; Felix & Belo, 2019). Seringkali keadaan kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan primer teru-

tama aspek pendapatan atau pengeluaran konsumsi (Jacobus dkk., 2018). Selain itu, kondisi kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). Di negara berkembang, isu kemiskinan menjadi penting untuk ditelusuri termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade, Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan, akan tetapi isu kesenjangan ekonomi regional masih menjadi pusat kebijakan di Indonesia (Skoufias & Olivieri, 2013).

Ketimpangan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tiga hal yaitu kesenjangan dalam pembangunan antar daerah, ukuran sebuah negara serta ketimpangan desa dan kota (Elson, 2013; Obend-Odoom, 2013; Boxall dkk., 2012; Greiner, 2011; dan Bahar & Hidalgo, 2014). Menurut Andres dkk. (2013), kekuatan pasar cenderung memperluas kesenjangan regional sehingga proses pembangunan ekonomi antar daerah menjadi tidak seimbang. Menurut BPS (2019), Secara garis besar penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 9,41% atau menurun 0,25% poin dari tahun sebelumnya September 2018. Berdasarkan keberadaan wilayah, presentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 6,89% menjadi 6,69% pada bulan Maret 2019, sedangkan daerah pedesaan turun menjadi 12,85% pada tahun 2019 dari 13,10% pada tahun 2018.



Sumber: Data Diolah Penulis, BPS Jawa Timur (2019)

**Gambar 1: Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2018**

Akan tetapi, permasalahan ketimpangan kemiskinan masih dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Menurut Khofifah, Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa penurunan kemiskinan pedesaan di Jawa Timur hanya turun sebesar 1% dibandingkan lima tahun lalu namun dalam enam bulan terakhir turun menjadi 0,48% (Dinisari, 2019). Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat masih memiliki kecenderungan menjadi rentan miskin. Gambar 1 menunjukkan presentase kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur berada di kabupaten Sampang dan Sumenep mencapai lebih dari 20% penduduk miskin. Selanjutnya diikuti dengan Kabupaten Bangkalan sebesar 19,59%, Kabupaten Probolinggo sebesar 18,71%, Kabupaten Tuban mencapai 15,31%, 14,47% Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ngawi 14,83%, dan Kabupaten Bondowoso sebesar 14,39%.

Untuk mengatasi ketimpangan regional, pengambil kebijakan melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan ke daerah miskin dan individu miskin secara langsung (Nalle & Kiha, 2018; Chronic Poverty Research Centre, 2008; Skoufias & Olivieri, 2013). Fokus skema kebijakan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan baik pendapatan jangka pendek maupun jangka panjang dari waktu ke waktu (Jalan & Ravallion, 1998; Mai & mahadevan, 2016). Perbedaan standar hidup antar daerah baik perkotaan dan pedesaan da-

lam wilayah tertentu mengalami dikotomi dalam pembuatan konsesus program kebijakan (Skoufias & Olivieri, 2013). Dari hal demikian, maka perlu untuk mengetahui sumber kesenjangan kemiskinan sehingga penulis melakukan analisis terhadap faktor-faktor penentu kesenjangan kemiskinan di Jawa Timur.

Mengacu pada penelitian Briyase dan Zwane (2017), Mai & Mahadevan (2016), Skoufias & Olivieri (2013) dan Jumirah & Wahyuni (2018), studi ini bertujuan untuk menganalisis jatuhnya ketimpangan sosial ekonomi di Jawa Timur dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan data longitudinal dari survei rumah tangga Indonesia yaitu *Indonesia Family Life Survey* (IFLS 5), studi ini berfokus pada level mikro yaitu individu dan rumah tangga di Jawa Timur. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian antara lain bagian dua (2) mendeskripsikan tinjauan pustaka. Bagian tiga (3) mendeskripsikan metodologi penelitian dan model analisis yang digunakan. Kemudian, hasil dan pembahasan dipresentasikan pada bagian empat (4), diikuti dengan kesimpulan pada bagian kelima (5).

### Telaah Literatur

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang dialami di suatu negara dimana seseorang akan dianggap masuk kategori miskin apabila tidak dapat mencapai kebutuhan standar hidupnya (Felix & Belo, 2019). Seseorang yang pendapatannya atau konsumsinya berada tidak jauh dari garis kemiskinan dapat dikatakan sebagai kategori miskin sementara karena individu tersebut akan rentan untuk miskin ketika terjadi *economy shock* (Mai & Mahadevan, 2016). Selain itu, pengentasan kemiskinan menjadi program pembangunan milenium di Indonesia (MDGs) dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian terkait kemiskinan sangat berkembang pesat dan luas dengan berbagai metode pengukuran kemiskinan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Beberapa literatur menyajikan hasil antara lain peningkatan modal manusia dan fisik orang miskin dapat mengurangi kemiskinan di suatu wilayah (Jalan & Ravallion, 1998). Salah satu pendorong kesejahteraan adalah perbaikan standar pendidikan dan kesehatan karena kedua hal tersebut merupakan investasi modal manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (Cremin & Nakabugo, 2012; Hafner & Mayer-Foulkes, 2013). Seorang kepala keluarga yang memiliki pencapaian pendidikan tinggi akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga daripada kepala keluarga yang tidak bersekolah (Akerle & Adewuyi, 2011; Gounder, 2013; Lekobane & Seleka, 2017; Briyase dan Zwane, 2017).

Penelitian di Afrika Selatan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, status kepala rumah tangga, *dummy* provinsi, jenis kelamin, status pekerjaan kepala rumah tangga, dan status pernikahan merupakan faktor penentu kesejahteraan rumah tangga (Briyase dan Zwane, 2017). Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Mai & Mahadevan (2016). Briyase dan Zwane (2017) menambahkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus tetap berfokus pada pedesaan. Studi empiris menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga (Sekhampu, 2013; Gounder, 2013; Lekobane & Sekela, 2017) dan negatif terhadap konsumsi per orang sebagai standar hidup rumah tangga (Fagnas & Wallace, 2007; Litchfield & McGregor, 2008; Gounder, 2012). Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka semakin tinggi probabilitas menjadi miskin. Hal ini disebabkan kebutuhan dasar rumah tangga memerlukan pemenuhan sumber daya yang lebih besar. Djamaluddin (2014) menganalisis kemiskinan di Jawa Barat dengan survei Susenas tahun 2010 sebanyak 20.541 rumah tangga menemukan bahwa jumlah anggota rumah tangga dan aset yang dimiliki signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya penelitian dari [Sekhampu \(2013\)](#) menggunakan model regresi logistik menemukan bahwa ukuran rumah tangga, usia, dan tingkat pekerjaan kepala rumah tangga memiliki probabilitas rumah tangga jatuh miskin secara signifikan di Bophelong. Penelitian tentang faktor kemiskinan di 33 provinsi Indonesia dari [Zuhdiyaty \(2017\)](#) menunjukkan bahwa Indek Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. analisis makro data sekunder BPS tahun 2011-2015, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Tetapi menurut [Barika \(2013\)](#) pengangguran berpengaruh positif artinya pengangguran yang dialami oleh seseorang akan mengakibatkan risiko kemiskinan yang lebih tinggi. Di sisi lain, studi [Jumirah dan Wahyuni \(2018\)](#) tentang pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan di Indonesia menunjukkan bahwa modal sosial seperti kepercayaan (*trust*), partisipasi kegiatan kemasyarakatan (*participation*), dan kerjasama (*cooperativeness*) mendukung peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Studi lainnya oleh [Mai & Mahadevan \(2016\)](#) tentang dinamika kemiskinan dan biaya ketidaksetaraan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan kronis cenderung lebih tinggi daripada kemiskinan sementara. Dengan menggunakan data panel, hasil menunjukkan bahwa pembiayaan program kemiskinan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan sehingga membutuhkan sistematika program yang tepat sasaran dan terarah. Bantuan keuangan seperti kredit mikro juga mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan penelitian oleh [Akotey & Adjasi \(2015\)](#) dan [Felix & Belo \(2019\)](#), tentang peranan kredit mikro dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Pemberian kredit mikro akan memberikan manfaat bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan terutama pada partisipasi kerja ([Akotey & Adjasi, 2015](#); [Felix & Belo, 2019](#)). Sejalan dengan studi dari [Mai & Mahadevan \(2016\)](#) menemukan bahwa kemiskinan sementara dapat diatasi dengan peningkatan dukungan bantuan keuangan berupa kredit mikro, skema asuransi, dan lainnya untuk mengatasi pengangguran jangka pendek. Pemberian modal kepada rumah tangga cenderung akan meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga tersebut ([Mai & Mahadevan, 2016](#)).

Menurut [Shepherd \(2011\)](#) dan [Bloom dkk. \(2003\)](#), lokasi atau wilayah mempengaruhi kemiskinan yaitu antara daerah terpencil (pedesaan) dan perkotaan. Hal ini disebabkan perbedaan akses baik sarana maupun prasarana sehingga cenderung terisolasi dari pusat kegiatan ekonomi dan politik. Dukungan pembangunan ekonomi daerah yang memadai seperti sektor pertanian, transportasi, dan fasilitas layanan lainnya memiliki pengaruh yang besar terhadap pengentasan kemiskinan di NTT, Indonesia ([Aba dkk., 2015](#)).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data *cross section* melalui sumber data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS 5) tahun 2014. IFLS 5 adalah survei aspek kehidupan rumah tangga Indonesia longitudinal dengan tangga panel sebanyak lima (5) putaran periode survei yang terdiri dari individu, rumah tangga, dan komunitas ([RAND, 2014](#)). Selain itu, sampel pada survei mewakili sekitar 83% populasi penduduk dari 13 provinsi di Indonesia. Unit analisis yang digunakan dalam studi ini difokuskan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.687 sampel responden. Untuk menganalisis faktor penentu kesejahteraan, studi ini menggunakan pengeluaran per kapita sebagai proksi penentu kesejahteraan individu dan rumah tangga ([Skoufias & Olivieri, 2013](#); [Jumirah & Wahyuni, 2018](#)). Agregat pengeluaran per kapita menjadi ukuran moneter kesejahteraan yang representatif dibandingkan pendapatan. Pengeluaran konsumsi mencerminkan gambaran standar hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang ia miliki sedangkan pendapatan rumah tangga dapat berasal dari berbagai

kegiatan dengan variasi dan biaya yang tidak selalu mudah ditetapkan sehingga akan menimbulkan variabel bias (Skoufias & Olivieri, 2013).

Selanjutnya ukuran kesejahteraan yang digunakan dalam studi ini akan dibagi menjadi dua model analisis yaitu agregate pengeluaran makanan dan non-makanan per capita yang telah di ubah dalam bentuk logaritma (Jumirah & Wahyuni, 2018) dan rasio kesejahteraan yaitu rasio pengeluaran rumah tangga terhadap garis kemiskinan rata-rata di wilayah tersebut (Ravallion & Wodon, 1999; Skoufias & Katayama, 2011; Skoufias & Olivieri, 2013). Model dasar logaritma dari agregat pengeluaran dapat dituliskan sebagai berikut (Cameron & Trivedi, 2005; Woldridge, 2016):

$$\ln W_{ij} = \beta_j X_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (1)$$

Dengan  $X_{ij}$  matriks karakteristik adalah matriks karakteristik rumahtangga, sedangkan  $\beta_j$  adalah vector koefisien yang bersesuaian dengan karakteristik rumah tangga  $X_{ij}$  dan  $\epsilon_{ij}$  adalah eror. Notasi  $\ln W_{ij}$  adalah logaritma dari  $W_{ij}$  yaitu pengukuran yang merupakan pengeluaran nominal per kapita (total pengeluaran pangan dan non-pangan) rumah tangga  $i$  di wilayah  $j$ . Model ini akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Faktor penentu dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik demografi responden, social capital, human capital, kepemilikan aset dan ketersediaan fasilitas di wilayah tersebut (Akerle & Adewuyi, 2011; Skoufias & Olivieri, 2013; Artha & Dartanto, 2015; Kurniawan, 2017; Jumirah & Wahyuni, 2018). Selanjutnya dari hasil logaritma didapatkan model persamaan dengan analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$\ln W_{ij} = \beta_0 + \beta_1 CrS_{ij} + \beta_2 HuC_{ij} + \beta_3 SoC_{ij} + \beta_4 Fs_{ij} + \beta_5 As_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (2)$$

Model persamaan kedua (2) dilakukan dengan pembentukan rasio kesejahteraan dari variabel pengeluaran pangan dan non pangan dalam bentuk skala ordinal yaitu 1 sampai dengan 5. Skala ordinal menunjukkan kesejahteraan yang memiliki level dan tingkatan dalam skala. Untuk membentuk rasio kesejahteraan maka digunakan rumus rasio pengeluaran per kapita dibagi garis kemiskinan rata-rata di wilayah tersebut (Ravallion & Wodon, 1999; Skoufias & Katayama, 2011; Skoufias & Olivieri, 2013).

$$WR(i,j) = \frac{W_{ij}}{PL} \quad (3)$$

*Welfare Ratio*, disimbolkan  $WR(i,j)$  menunjukkan rasio kesejahteraan rumah tangga  $i$  di wilayah  $j$ .  $PL$  adalah rasio rata-rata garis kemiskinan (*Poverty Line*) di Jawa Timur. Dari hasil pembentukan tersebut ditransformasikan dalam lima wilayah berdasar nilai P sebagai skala ordinal kesejahteraan berdasarkan pengeluaran rendah sampai tinggi.

$$P = \begin{cases} 1 & \text{jika } WR(i,j) \leq P1 \\ 2 & \text{jika } P1 < W(i,j) \leq P2 \\ 3 & \text{jika } P2 < W(i,j) \leq P3 \\ 4 & \text{jika } P3 < W(i,j) \leq P4 \\ 5 & \text{jika } W(i,j) > P4 \end{cases} \quad (4)$$

Dimana  $P1, P2, P3, P4$  dan  $P5$  merupakan ambang batas (*threshold*) dengan batasan  $P1 < P2 < P3 < P4 < P5$ . Selanjutnya ambang batas tersebut akan diestimasi dengan  $\beta_{ij}$  dengan analisis *ordered logistic regression model*. Sehingga model kedua ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\ln \left[ \frac{W_{ij}}{1 - W_{ij}} \right] = \beta_0 + \beta_1 CrS_{ij} + \beta_2 HuC_{ij} + \beta_3 SoC_{ij} + \beta_4 Fs_{ij} + \beta_5 As_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (5)$$

Berdasarkan acuan penelitian dari Akerele & Adewuyi (2011); Skoufias & Olivieri (2013); Artha & Dartanto (2015); Kurniawan (2017); Jumirah & Wahyuni (2018) maka penulis membagi variabel menjadi 5 bagian. Bagian pertama (1) yaitu variabel *dummy* pinjaman kredit mikro (*CrS*) dimana nilai '1' jika individu meminjam kredit mikro dan '0' jika tidak ada pinjaman kredit mikro Felix & Belo (2019). Selanjutnya, bagian kedua (2) vektor *HuC* yaitu variabel karakteristik individu yang terdiri dari umur, jumlah anggota rumah tangga, *dummy* status kepala rumah tangga, jenis kelamin (*dummy* laki-laki), *dummy* status pernikahan, *dummy* pekerjaan dan lama pendidikan yang ditempuh. Vektor *SoC* atau modal sosial yaitu berisi variabel *dummy* partisipasi dan kerjasama (Jumirah & Wahyuni, 2018).

Pada bagian keempat (4), *Fs* yaitu fasilitas atau infrastruktur memiliki cakupan atas variabel *dummy* ketersediaan layanan kesehatan dan sawah irigrasi, persentase listrik yang ada di wilayah tersebut, jenis jalan dari desa ke pusat kota, dan jumlah sekolah baik sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Sedangkan *As* yaitu terdiri dari *dummy* kepemilikan lahan tani dan usaha non tani oleh responden. Dependen variabel dalam penelitian ini yaitu pengeluaran per kapita sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi di Jawa Timur yang dinotasikan dengan  $\ln W_{ij}$  untuk model regresi linier berganda dan  $WR(i,j)$  untuk model *ordered logistic regression*. Sedangkan notasi *i* menyatakan bahwa data bersifat *cross-section* dari individu responden,  $\beta$  adalah parameter, dan  $\mu$  adalah *error term* dalam model.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode analisis sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada survei data di Provinsi Jawa Timur dengan responden sebanyak 2.687 responden. Tabel 1 menunjukkan deskripsi statistik responden dalam penelitian ini. Pengeluaran per kapita rata-rata dalam penelitian sebesar Rp881.693, selain itu pengeluaran per kapita minimal sebesar Rp91.645 sedangkan pengeluaran per kapita Rp6.550.250. Selanjutnya setiap responden memiliki pendidikan tertinggi yang ditempuh selama 18 tahun pendidikan yaitu sekitar memasuki perguruan tinggi jenjang pascasarjana sedangkan paling rendah adalah individu yang sama sekali tidak memperoleh pendidikan.

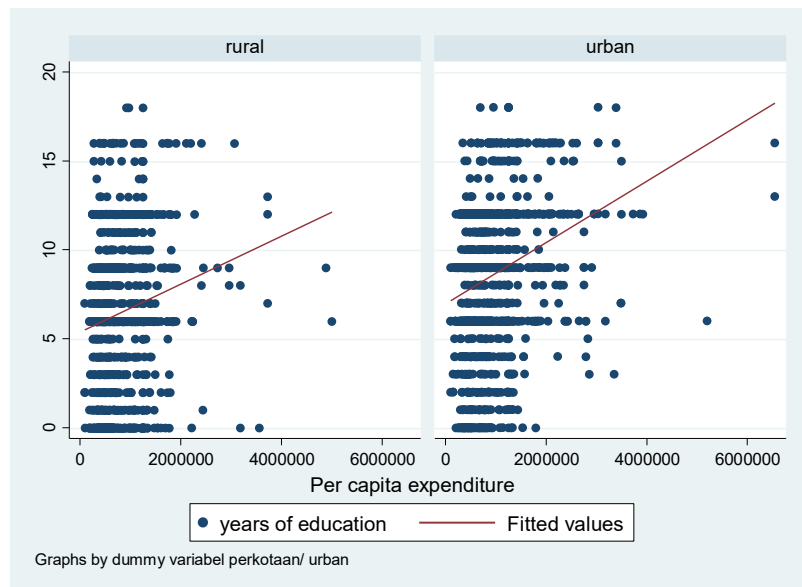
**Tabel 1: Ringkasan Deskripsi Statistik Variabel**

Variabel	Obs	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Max
<b>Karakteristik Demografi</b>					
umur	2687	40.43	15.7969	15	93
Laki-laki	2687	0.449	0.4975	0	1
Status Pernikahan (menikah)	2687	0.729	0.4443	0	1
Status Kepala Rumah Tangga ( <i>HoH</i> )	2687	0.373	0.4837	0	1
Lama Pendidikan yang ditempuh	2687	7.567	4.3259	0	18
Status Pekerjaan ( <i>Unemployed</i> )	2687	0.413	0.4925	0	1
Urban ( <i>dummy</i> )	2687	0.513	0.4999	0	1
Jumlah Anggota Rumah Tannga	2687	4.176	1.6767	1	10
<b>Kepemilikan Aset &amp; Lainnya</b>					
Lahan Pertanian	2687	0.359	0.47980	0	1
Usaha non pertanian	2687	0.421	0.4938	0	1
Pinjaman / Kredit Mikro	2687	0.300	0.4584	0	1

Variabel	Obs	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Max
<b>Fasilitas dan Infrastruktur</b>					
Akses Jalan yang dimiliki desa	2687	1.103	0.4290	0	1
Akses listrik desa ( <i>percentage</i> )	2687	93.55	9.7054	60	100
Ketersediaan pabrik di desa	2687	0.604	0.4890	0	1
Ketersediaan sawah irigasi	2687	0.636	0.4810	0	1
Ketersediaan layanan kesehatan	2687	0.7644	0.4244	0	1
Total sarana pendidikan (SD)	2687	5.54	3.7410	1	16
Total sarana pendidikan (SMP)	2687	5.696	4.5049	1	18
Total sarana pendidikan (SMA)	2687	5.582	4.2226	1	18

Sumber: Data diolah penulis, IFLS 5 tahun 2019

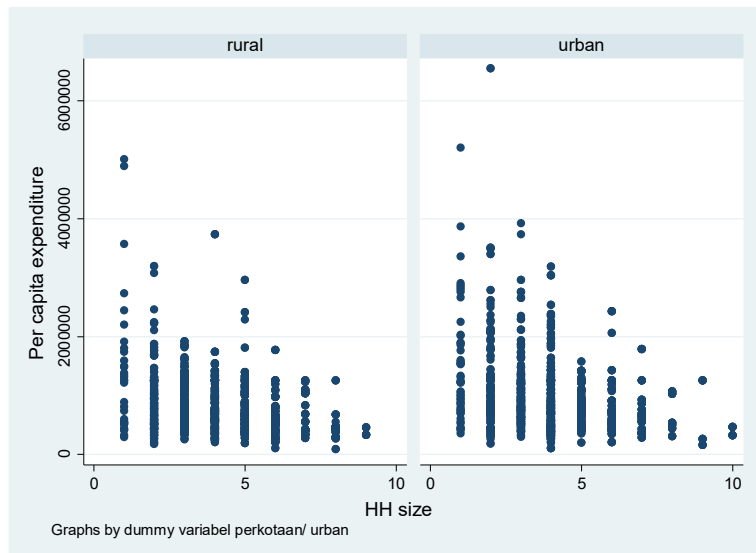
Data statistik Jawa Timur juga menunjukkan berapa banyak fasilitas layanan pendidikan yang ada di kabupaten/kota Jawa Timur. Dari hasil statistik menyatakan total fasilitas pendidikan paling dalam suatu kabupaten atau kota di Jawa Timur sebanyak 16 sekolah dasar (SD), 18 sekolah menengah pertama (SMP) dan 18 sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan total fasilitas pendidikan paling sedikit sebanyak 1 sekolah baik SD, SMP, dan SMA. Pada umur responden terlihat bahwa responden dalam penelitian ini maksimum berumur 93 tahun dan minimum 15 tahun.



Sumber: Data diolah penulis, IFLS 5 tahun 2014

**Gambar 2: Hubungan antara Lama Pendidikan dan Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Wilayah**

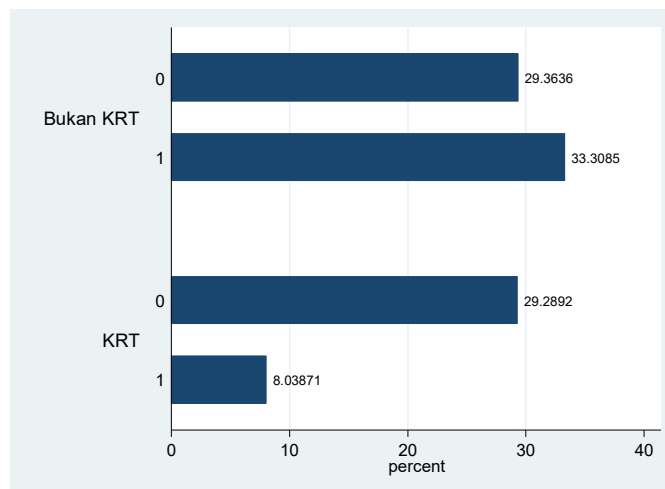
Dari gambar *scatter plot* diatas, digambarkan bahwa lama pendidikan yang ditempuh responden cenderung akan meningkatkan pengeluaran per kapita. Besaran pengeluaran responden ini menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan responden meningkat dimana diasumsikan bahwa seseorang yang berpendidikan semakin tinggi akan lebih tinggi tingkat pengetahuannya terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehingga ia akan memaksimalkan kebutuhannya. Untuk wilayah perkotaan memiliki kecenderungan kesejahteraan lebih tinggi seiring dengan lamanya pendidikan yang responden tempuh dibandingkan wilayah pedesaan.



Sumber: Data diolah penulis, IFLS 5 tahun 2014

**Gambar 3: Hubungan Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Pengeluaran Per Kapita**

Selanjutnya, hubungan antara jumlah anggota rumah tangga dan pengeluaran per kapita pada penelitian ini berbanding terbalik yaitu semakin banyaknya jumlah anggota rumah tangga, maka tingkat kesejahteraan akan turun. Hal ini diidentifikasi dari rendahnya tingkat pengeluaran per kapita baik pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Akan tetapi, wilayah pedesaan memiliki kecenderungan lebih rendah daripada perkotaan.

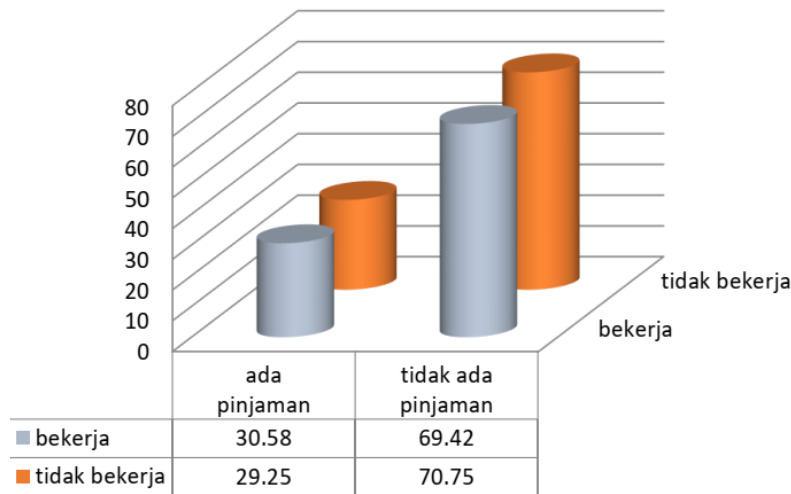


Notasi untuk dummy 1: tidak bekerja (unemployed) dan 0: bekerja (employed)

**Gambar 4: Persentase Perbandingan Status Kepala Rumah Tangga dan Status Pekerjaan**

Studi ini membagi dua kriteria responden yaitu sebagai kepala rumah tangga atau non kepala rumah tangga. Data statistik menunjukkan bahwa responden yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dan memiliki pekerjaan sebanyak 29.28% atau sekitar 787 responden. Sedangkan kepala rumah tangga yang tidak bekerja sebesar 8.04% saja. Di sisi lain, seseorang yang tidak berstatus sebagai kepala rumah tangga dan bekerja sebanyak 29,36% atau 789 orang. Sebaliknya, seseorang bukan kepala rumah tangga dan tidak bekerja sebanyak 33.31% atau mencapai 895 responden.





Sumber: Data diolah penulis, IFLS 5 tahun 2014

**Gambar 5: Hubungan status pekerjaan dan status pinjaman kredit mikro**

Gambar 5 diatas menunjukkan hubungan antara status pekerjaan responden dengan status peminjaman kredit mikro. Data statistik di atas mengilustrasikan bahwa individu yang bekerja dan melakukan pinjaman kredit mikro sebanyak 30,58% atau 822 orang sedangkan yang tidak melakukan pinjaman kredit mikro sebesar 69,42% atau sekitar 1.865 responden. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang bekerja cenderung ke arah kategori sejahtera untuk mencukupi kebutuhan individu maupun rumah tangga nya. Untuk seseorang yang tidak bekerja dan melakukan pinjaman kredit mikro terdapat 786 responden sedangkan yang tidak melakukan pinjaman mencapai 70,75% responden. Hal ini diduga bahwa sedikitnya pinjaman mikro kredit yang tersalurkan kepada individu yang tidak bekerja karena adanya administrasi yang tidak memenuhi syarat peminjaman. Padahal program pembiayaan kredit mikro merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dimana seseorang akan menggunakan pembiayaan tersebut untuk mendukung produktivitas yang ia butuhkan seperti penambahan modal usaha mandiri.

Selanjutnya, hasil penelitian disajikan dalam dua persamaan model yaitu model regresi linier berganda dengan menggunakan logarithma pengeluaran per kapita sebagai dependen variabel dan regresi *ordered logistic* dengan pembentukan skala ordinal dari pengeluaran per kapita. Hasil analisis penelitian ditunjukkan dari table 2 menunjukkan bahwa beberapa pernyataan bahwa pinjaman mikro kredit signifikan secara positif berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga yaitu ketika seseorang melakukan pinjaman kredit mikro maka pengeluaran per kapita akan meningkat 11%.

**Tabel 2: Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda di Provinsi Jawa Timur**

Variabel	Koef.	Stand. Error	P > Z (Sigf)
Pinjaman Kredit Mikro	0.11781	0.022366	<b>0.000***</b>
<b>Karakteristik Demografi:</b>			
Laki-laki	0.02295	0.273528	0.401
Umur	0.01381	0.004515	<b>0.002**</b>
Umur Kuadrat (age <sup>2</sup> )	-0.00014	0.000051	<b>0.005**</b>
Status Pernikahan (Menikah)	-0.00285	0.028110	0.919

Variabel	Koef.	Stand. Error	P > Z (Sigf)
<b>Karakteristik Demografi:</b>			
Status Kepala Rumah Tangga (HoH)	-0.01229	0.030021	0.682
Jumlah Anggota Rumah Tangga (HHSIZE)	-0.13170	0.006481	<b>0.000***</b>
Status Pekerjaan ( <i>unemployed</i> )	0.03421	0.024208	0.158
Lama Pendidikan Yang Ditempuh	0.03215	0.003041	<b>0.000***</b>
<b>Variabel Modal Sosial:</b>			
Partisipasi Kegiatan Masyarakat	0.05485	0.028781	<b>0.057*</b>
Kerjasama	0.13280	0.077903	<b>0.088*</b>
<b>Fasilitas dan Infrastruktur:</b>			
Jumlah Sekolah Dasar	-0.003558	0.003331	0.286
Jumlah Sekolah Menengah Pertama	0.009338	0.003314	<b>0.005**</b>
Jumlah Sekolah Menengah ke Atas	0.007958	0.003908	<b>0.042**</b>
Jenis Jalan Desa	0.128078	0.056867	<b>0.024**</b>
Ketersediaan Layanan Kesehatan	-0.019279	0.028161	0.494
Persentase penggunaan listrik di Desa	-0.000763	0.001878	0.685
Ketersediaan Sawah Irigasi	-0.06645	0.029550	<b>0.025**</b>
<b>Kepemilikan Asset</b>			
Kepemilikan Lahan Tani	0.162723	0.023892	<b>0.000***</b>
Kepemilikan Usaha Non-Tani	0.130383	0.021266	<b>0.000***</b>
<b>Constant</b>			

Sumber: Data diolah penulis, berdasarkan IFLS 5 tahun 2014

Noted: Dependen variabel penelitian  $\ln W_{ij}$  yaitu logarithma dari total pengeluaran per kapita dari. Tingkat signifikansi \* $p < 0.1$ ; \*\* $p < 0.05$ ; \*\*\*  $p < 0.001$ , *standard errors in parentheses*

Diasumsikan bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan, peningkatan usaha, dan partisipasi tenaga kerja. Sejalan dengan penelitian [Akotey & Adjasi \(2015\)](#), [Mai & Mahadevan \(2016\)](#) dan [Felix & Belo \(2019\)](#) dimana pemberian kredit mikro memberikan manfaat bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan terutama pada partisipasi kerja dalam mengurangi pengangguran jangka pendek sehingga cenderung akan meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga tersebut. Pada karakteristik individu menyatakan bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Semakin bertambahnya umur seseorang maka pengeluaran per kapita akan bertambah sebesar 1.38% dengan tingkat signifikansi  $0.002 < 0.05$ . Akan tetapi umur memiliki sifat non linier dimana setelah umur melewati batas titik maksimum (memasuki usia pensiun/lansia) maka kesejahteraan akan turun. Hasil ini didukung penelitian dari [Sekhampu \(2013\)](#) bahwa usia mempengaruhi kesejahteraan seseorang.

Selain itu, semakin bertambahnya anggota keluarga dalam satu rumah tangga sebanyak 1 satuan cenderung akan menurunkan kesejahteraan sebesar 13,17%. Hal ini ditimbulkan karena penambahan anggota keluarga semakin tinggi kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang harus dipenuhi sehingga cenderung akan mendorong rumah tangga menjadi miskin. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian ([Sekhampu, 2013](#); [Gounder, 2013](#); [Lekobane &](#)

Sekela, 2017; Fagernas & Wallace, 2007; Litchfield & McGregor, 2008; Gounder, 2012; Djama-luddin, 2014). Di sisi lain, pendidikan sebagai modal manusia (*human capital*) menjadi salah satu misi peningkatan MDGs Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi. Hasil pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan seseorang. Ketika ada penambahan 1 tahun pendidikan seseorang maka kesejahteraan seseorang tersebut naik sebesar 3,2% dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 ( $p < 0.001$ ).

Pendidikan menjadi salah satu standar pendorong kesejahteraan melalui investasi modal manusia dan sering digunakan sebagai salah satu indikator penentu indeks pembangunan manusia yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Cremin & Nakabugo, 2012; Hafner & Mayer-Foulkes, 2013; Briyase dan Zwane, 2017; Sekhampu, 2013). Hasil penelitian sebelumnya mendukung hasil hipotesis ini yaitu seorang kepala keluarga yang memiliki pencapaian pendidikan tinggi akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga daripada kepala keluarga yang tidak bersekolah (Akerele & Adewuyi, 2011; Gounder, 2013; Lekobane & Seleka, 2017; Briyase dan Zwane, 2017). Dengan demikian, peranan layanan pendidikan untuk masyarakat sangat penting untuk kesejahteraan wilayah tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui hasil jumlah ketersediaan layanan pendidikan sekolah di Jawa Timur memberikan hasil signifikan terhadap kesejahteraan seseorang. Selain itu, kepemilikan lahan pertanian dan usaha non pertanian seseorang menunjukkan peranan signifikan dan positif terhadap kesejahteraan. Hasil menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki lahan pertanian sebesar 1 satuan akan meningkatkan kesejahteraan sebesar 16,27% dan apabila memiliki usaha non pertanian (berdagang dan wiraswasta lainnya) maka kesejahteraan meningkat sebesar 13.03%. kedua hasil tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 0.000 yaitu  $p < 0.001$ .

Hasil estimasi model persamaan kedua (2) menggunakan *ordered logistic regression* ditunjukkan oleh tabel 3 sebagai berikut. Hasil ringkasan tabel tersebut memberikan sugesti bahwa pinjaman kredit mikro menjadi peranan penting peningkatan kesejahteraan. Peranan bantuan keuangan ini memicu seseorang akan meningkatkan produktivitasnya baik dalam partisipasi tenaga kerja maupun menciptakan lapangan kerja sendiri (wiraswasta). Lembaga intermediasi keuangan mikro memiliki peran penting mengentaskan kemiskinan. Dukungan dari studi Felix & Belo (2019), Beck & Levine (2014), Prokopenko & Holden (2001) mengatakan bahwa pengembangan perantara keuangan dalam penyaluran kredit dapat mengurangi ketimpangan pendapatan secara tidak proposional dan meningkatkan pendapatan orang miskin. Akan tetapi, kredit mikro bukanlah satu-satunya bantuan keuangan untuk solusi mengurangi kemiskinan. Hal lainnya seperti pemberian bantuan langsung tunai dari pemerintah yaitu *conditional cash transfer* (BLT, PKH, dan lainnya).

Pada variabel jumlah anggota rumah tangga menunjukkan hasil signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Pada rumah tangga miskin (P1 dan P2) menyatakan bahwa ketika jumlah anggota rumah tangga bertambah 1 orang maka probabilitas rumah tangga menjadi miskin semakin besar. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada rumah tangga menengah sampai kaya (P3, P4, dan P5) karena adanya penambahan anggota rumah tangga maka probabilitas menjadi miskin rendah. Hal ini diduga rumah tangga menengah sampai kaya cenderung dapat mempertahankan pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk keluarganya bahkan lebih dari itu sehingga kecenderungan untuk rentan miskin sangat kecil. Penelitian ini memberikan perluasan hasil dari penelitian sebelumnya oleh Sekhampu (2013); Gounder (2013); Lekobane & Sekela (2017); Fagernas & Wallace (2007); Litchfield & McGregor (2008); Gounder (2012); Djama-luddin (2014) bahwa probabilitas penurunan kesejahteraan akibat adanya penambahan anggota rumah tangga hanya rentan terjadi pada rumah tangga kategori sangat miskin dan miskin, tetapi sebaliknya untuk rumah tangga menengah dan kaya.

Tabel 3: Hasil Estimasi *Ordered Logistic Regression* berdasarkan Skala Ordinal Kesejahteraan (Miskin-Kaya)

Variabel	P1		P2		P3		P4		P5	
	dy/dx	Signf.	dy/dx	Signf.	dy/dx	Signf.	dy/dx	Signf.	dy/dx	Signf.
Pinjaman Kredit Mikro	-0.0761	<b>0.000***</b>	-0.0088	<b>0.000***</b>	0.0254	<b>0.000***</b>	0.0309	<b>0.000***</b>	0.0288	<b>0.000***</b>
Umur	-0.0100	<b>0.001***</b>	-0.00116	<b>0.002**</b>	0.0033	<b>0.001***</b>	0.0041	<b>0.001***</b>	0.0038	<b>0.001***</b>
Umur (age <sup>2</sup> )	0.00011	<b>0.001***</b>	0.00001	<b>0.003**</b>	-0.00004	<b>0.001***</b>	-0.000044	<b>0.001***</b>	-0.00004	<b>0.001***</b>
Laki-laki	-0.0254	0.179	-0.00295	0.190	0.0084	0.181	0.0103	0.182	0.0960	0.180
Menikah	-0.01388	0.462	-0.00162	0.465	0.0046	0.463	0.00564	0.463	0.00526	0.462
Jumlah anggota rumah tangga	0.09002	<b>0.000***</b>	0.01049	<b>0.000***</b>	-0.02986	<b>0.000***</b>	-0.03657	<b>0.000***</b>	-0.03408	<b>0.000***</b>
Status kepala rumah tangga	0.01390	0.509	0.00162	0.513	-0.00461	0.509	-0.00565	0.510	-0.00526	0.509
Lama pendidikan yang ditempuh	-0.02145	<b>0.000***</b>	-0.00250	<b>0.000***</b>	0.00712	<b>0.000***</b>	0.00872	<b>0.000***</b>	0.008125	<b>0.000***</b>
Status pekerjaan ( <i>unemployed</i> )	-0.02554	0.106	-0.00311	0.116	0.00884	0.106	0.0108	0.106	0.01008	0.108
Partisipasi kegiatan masyarakat	-0.03552	<b>0.073*</b>	-0.00414	<b>0.079*</b>	0.01178	<b>0.075*</b>	0.01443	<b>0.073*</b>	0.01345	<b>0.075*</b>
Kerjasama	-0.0809	0.114	-0.009436	0.130	0.0268	0.114	0.03287	0.116	0.03065	0.118
Dummy urban	-0.06724	<b>0.001***</b>	-0.00784	<b>0.002**</b>	0.0223	<b>0.001***</b>	0.02732	<b>0.001***</b>	0.02546	<b>0.001***</b>
Jumlah Sekolah Dasar	0.00543	<b>0.0015**</b>	0.00063	<b>0.022**</b>	-0.0018	<b>0.016**</b>	-0.00221	<b>0.017**</b>	-0.0021	<b>0.016**</b>
Jumlah Sekolah Menengah Pertama	-0.00392	<b>0.061*</b>	-0.00046	<b>0.073*</b>	0.0013	<b>0.061*</b>	0.00159	<b>0.062*</b>	0.00148	<b>0.065*</b>
Jumlah Sekolah Menengah Atas	-0.00052	0.818	-0.00006	0.818	0.00017	0.818	0.00021	0.818	0.00019	0.818
Jenis jalan di Desa	-0.0555	0.136	-0.00647	0.141	0.01843	0.136	0.02256	0.134	0.02103	0.142
Persentase Listrik di Desa	0.0022	0.118	0.00026	0.133	-0.00073	0.118	-0.00089	0.121	-0.0008338	0.119
Ketersediaan Pabrik	-0.069	<b>0.000***</b>	-0.00805	<b>0.000***</b>	0.02289	<b>0.000***</b>	0.02804	<b>0.000***</b>	0.02614	<b>0.000***</b>
Ketersediaan Sawah irigasi	0.03783	<b>0.08*</b>	0.0044	0.09*	-0.01255	<b>0.082*</b>	-0.01536	<b>0.08*</b>	-0.01433	<b>0.083*</b>
Ketersediaan layanan kesehatan	0.0259	0.207	0.00297	0.214	-0.0845	0.207	-0.01035	0.208	-0.0096	0.209
Kepemilikan Lahan pertanian	-0.10428	<b>0.000***</b>	-0.01216	<b>0.000***</b>	0.03458	<b>0.000***</b>	0.04236	<b>0.000***</b>	0.03949	<b>0.000***</b>
Kepemilikan Lahan non pertanian	-0.07859	<b>0.000***</b>	-0.00916	<b>0.000***</b>	0.02606	<b>0.000***</b>	0.03193	<b>0.000***</b>	0.02976	<b>0.000***</b>

Sumber: Data diolah penulis, IFLS 5, 2014

Noted: nilai P1, P2, P3, P4 dan P5 adalah nilai skala ordinal kesejahteraan berdasarkan pengeluaran rendah sampai dengan tinggi dimana P1-P5 merupakan ambang batas (*threshold*) dengan batasan P1 < P2 < P3 < P4 < P5. P1: RT sangat miskin, P2: RT miskin, P3: RT menengah ke atas, P4 : RT kaya, P5 : RT sangat kaya. Tingkat signifikansi \*p<0.1; \*\* p <0.05; \*\*\* p < 0.001, *standard errors in parentheses*

Tabel 4: Hasil Estimasi Determinan Kesejahteraan berdasarkan 10 Distrik Kategori Miskin di Jawa Timur

Variabel	Estimasi dari sampel 10 Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi									
	Bangkalan	Probolinggo	Tuban	Ngawi	Pamekasan	Bondowoso	Lamongan	Nganjuk	Gresik	Madiun
Pinjaman Kredit Mikro	0.942	<b>0.064*</b>	<b>0.076*</b>	<b>0.000***</b>	0.511	0.883	0.855	0.104	0.221	0.189
Laki-Laki	0.959	0.952	0.944	<b>0.050**</b>	0.256	0.652	0.994	0.154	0.978	0.258
Status Kepala Rumah Tangga	0.402	0.962	0.442	<b>0.086*</b>	0.461	0.950	<b>0.085*</b>	0.222	0.785	0.595
Status Pekerjaan ( <i>unemployed</i> )	0.990	0.356	0.765	0.613	0.967	<b>0.079*</b>	0.935	<b>0.059*</b>	<b>0.071*</b>	0.750
Status pernikahan ( <i>menikah</i> )	0.794	0.630	0.924	0.659	0.990	0.508	0.124	0.105	0.543	0.566
Umur	0.472	0.680	0.862	<b>0.074*</b>	0.939	0.289	<b>0.049**</b>	0.287	<b>0.074*</b>	0.780
Jumlah anggota rumah tangga	0.402	<b>0.003**</b>	0.116	<b>0.000***</b>	<b>0.002**</b>	0.423	<b>0.000***</b>	<b>0.001***</b>	0.264	<b>0.072*</b>
Lama pendidikan yang Ditempuh	<b>0.020**</b>	<b>0.039**</b>	0.283	<b>0.005*</b>	0.764	0.082	0.864	0.456	<b>0.008**</b>	<b>0.035**</b>
Partispasi kegiatan masyarakat	0.288	<b>0.043**</b>	0.288	0.228	0.932	0.512	0.985	0.275	<b>0.029**</b>	0.106
Kerjasama kegiatan masyarakat	0.805	0.108	0.318	( <i>omitted</i> )	0.203	0.356	0.558	0.940	( <i>omitted</i> )	( <i>omitted</i> )
Kepemilikan lahan pertanian	0.291	0.521	0.864	<b>0.054*</b>	<b>0.014**</b>	0.872	0.727	0.219	0.006	0.752
Kepemilikan usaha non pertanian	0.151	0.422	<b>0.001***</b>	0.989	0.686	<b>0.021**</b>	<b>0.095*</b>	<b>0.010***</b>	0.044	0.113

Sumber: Data diolah penulis, IFLS 5 tahun 2014

Noted: Pengukuran menggunakan *interaction variable* antara variabel x dengan distrik i. Dependen variabel yang digunakan adalah lnce yaitu logaritma dari total pengeluaran per kapita. Terdapat beberapa *omitted variable* pada data observasi distrik tertentu seperti Sampang, Sumenep, dan Pacitan sebagai daerah termiskin di Jawa Timur menurut BPS karena ketersediaan sampel individu data IFLS 5 di distrik tersebut. Tingkat signifikansi \*p<0.1; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.001, *Standard errors in parentheses*

Kepemilikan aset seperti lahan pertanian dan usaha non pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan di Jawa Timur. Probabilitas seseorang menjadi sejahtera akan meningkat seiring kepemilikan aset tersebut dan probabilitas untuk menjadi miskin menjadi turun. Peranan pendidikan pun menjadi titik fokus peningkatan kesejahteraan individu dan rumah tangga. Terlihat pada tabel 4 bahwa beberapa daerah kabupaten yang masuk kategori termiskin di Jawa Timur sebagian besar pendidikan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif terutama untuk masyarakat miskin sangat diperlukan. Efek jangka panjang pendidikan akan berpengaruh pada partisipasi tenaga kerja yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya pengangguran. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barika (2013) menyatakan bahwa pengangguran yang dialami oleh seseorang akan mengakibatkan risiko kemiskinan yang lebih tinggi.

Pembangunan ekonomi daerah yang memadai seperti sektor pertanian, transportasi, dan fasilitas layanan lainnya memiliki pengaruh yang besar terhadap pengentasan kemiskinan terutama di daerah pedesaan (Bloom dkk., 2013; Aba dkk., 2015). Pentingnya pembangunan ekonomi pedesaan disebabkan masih sering terjadinya perbedaan akses baik sarana maupun prasarana sehingga cenderung terisolasi dari pusat kegiatan ekonomi dan politik.

Selain pendidikan dan infrastruktur desa, pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan juga menjadi penting. Hasil estimasi regresi linier berganda dan *ordered logistic* dengan menunjukkan secara konsisten berpengaruh signifikan positif meningkatkan kesejahteraan individu dan mengurangi kemiskinan. Modal sosial merupakan sumber daya yang dimiliki individu dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai sosial untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Modal sosial dibagi menjadi beberapa bagian yaitu kepercayaan (*trust*), kerjasama (*cooperativeness*) dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa apabila seseorang berpartisipasi dan bekerjasama dalam kegiatan kemasyarakatan maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 5,4% dan 13,28%. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Jumirah & Wahyuni (2018).

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pinjaman kredit mikro kepada masyarakat miskin memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan. Selain itu, kemungkinan bantuan keuangan lainnya seperti *conditional cash transfer* yang dicanangkan oleh pemerintah juga menjadi bagian penting untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan di Jawa Timur. Bantuan ini perlu didorong dengan peningkatan layanan dan strategi pemberian bantuan yang efektif dan tepat sasaran. Peningkatan investasi modal manusia juga menjadi fokus hasil dari penelitian ini yaitu pendidikan seseorang yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Faktor lainnya seperti umur dan jumlah anggota rumah tangga, modal sosial, jumlah layanan pendidikan (sekolah SD, SMP dan SMA), kepemilikan lahan pertanian dan usaha non pertanian memiliki kecenderungan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga di Jawa Timur. Sehingga diperlukan adanya dukungan pemerintah melalui pembangunan ekonomi daerah berdasarkan peluang sumber daya yang ada di masing-masing wilayah sehingga bantuan pengentasan kemiskinan tepat sasaran baik kepada rumah tangga dan kebutuhan wilayah tersebut.

Keterbatasan penelitian ini menjadi pengembangan untuk penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pembuktian pengaruh sebuah program bantuan akan lebih efektif menggunakan metode evaluasi dampak sehingga studi ini terbatas pada determinan apa saja yang mem-

pengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini juga memiliki omitted variabel distrik yang tidak terdapat dalam survei data seperti kabupaten Sampang, Sumenep dan Pacitan yang dimana ketiga daerah tersebut masuk dalam kategori wilayah termiskin di Jawa Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Keterbatas lainnya kemungkinan adanya masalah endogenous di beberapa variabel tertentu terhadap variabel dependen. Studi ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dan lembaga terkait untuk mencapai program pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah tersebut, serta menjadi rancangan dukungan komprehensif terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga Jawa Timur.

### Daftar Pustaka

- Aba, F.X.L., Yussof O.M., Saidatulakmal. (2015). Analysis of Economic Structure in Poverty Eradication in the Province of East Nusa Tenggara Indonesia. *Journal of Social and Behavioral Sciences*, 211, 81-88.
- Akerele, D., Adewuyi, S.S. (2011). Analysis of Poverty and Socioeconomic Determinants of Welfare among Urban Households of Ekiti State, Nigeria. *Current Research Journal of Social Sciences*. 3(1), 1-7.
- Akotey, Joseph O., Adjasi C.K.D. (2015). Does Microcredit Increase Household Welfare in the Absence of Microinsurance?. *Journal of World Development*, 77, 380–394.
- Andres, L., D. Biller, and M. H. Dappe. (2013). *Reducing Poverty by Closing South Asia's Infrastructure Gap*. Washington, DC: World Bank.
- Artha Dwi R.P., Dartanto, Teguh. (2015) *Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia*. LPEM-FEUI Working Paper 002, ISSN 2356-4008.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019. Berita Resmi Statistik. No.56/07/Th.XXII, 15 Juli 2019.
- BPS Jawa Timur. (2019). Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018. Retrieved by <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>. On Sept 04, 2019 at 03.20 pm.
- Bahar, D. R.Hausmann, and C.A. Hidalgo. (2014). Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion?..*Journal of International Economics*, 92(1), 111–23.
- Barika. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 5(3), 27–36.
- Beck, T., Levine, R. (2004). Stock Markets, Banks, and Growth: Panel Evidence. *Journal of Bank Finance*, 28(3), 423–442.
- Bloom, D., Canning, J., Sevilla, J. (2003). Geography and Poverty Traps. *Journal of Economy Growth*, 8, 355-378.
- Boxall, Peter, Adamowicz, W.L., Olar, M., West, G.E., Cantin, G. (2012). Analysis of the Economic Benefits Associated with The Recovery of Threatened Marine Mammal Species in

- the Canadian St. *Lawrence Estuary Journal. Mar. Policy* 36(1), 189–197.
- Briyase, Mduduzi., Zwane, Talent. (2017). An Empirical Analysis of the Determinants of Poverty and Household Welfare in South Africa. *Munich Personal RePEc Archive*. MPRA Paper No.77085.
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: methods and applications*. Cambridge university press.
- Cremin, P. & Nakabugo, M.G. (2012). Education, development and poverty reduction: A literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4), 499–506.
- Chronic Poverty Research Center (CPRC). (2008). *The Chronic Poverty Report 2008-2009: Escaping Poverty Traps*. Chronic Poverty Research Centre, UK.
- Dinisari, Mia Chitra.(2019). *Khofifah Cemasikan Anomali Kemiskinan di Jawa Timur*. Retrieved by <https://surabaya.bisnis.com/read/20190804/531/1132293/khofifah-cemasikan-anomali-kemiskinan-di-jawa-timur>, on Sept 04 2019, at 03.02 pm.
- Djamaluddin, Sartika. (2014). Analysis of Poverty Determinant in West Java Province. *Working Paper in Economics and Business, IV(03)*.
- Elson, Anthony. (2013). *Globalization and Development: Why East Asia Surged Ahead and Latin America Fell Behind*. New York: Palgrave MacMillan
- Fagernas, S. and Wallace, L. (2007). *Determinants of poverty in Sierra Leone, 2003*. (ESAU Working Paper No. 19). London, England: Overseas Development Institute.
- Felix, Elisabete GS., Belo, Teresa F. (2019). The Impact of Microcredit on Poverty Reduction in Eleven Developing Countries in South-East Asia. *Journal of Multinational Financial Management*. 52, 1-16.
- Greiner, A., (2011). Economic growth, public debt and welfare: comparing three budgetary rules. *German Economic Review*, 12, 205–222
- Gounder, N. (2013). Correlates of poverty in Fiji: An analysis of individual, household and community factors related to poverty. *International Journal of Social Economics*, 40(10), 923–938.
- Gujarati, Damodar N., Porter, Dawn C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Basic Econometric) Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Hafner, K.A. & Mayer-Foulkes, D. (2013). Fertility, economic growth, and human development causal determinants of the developed lifestyle. *Journal of Macroeconomics*, 38, 107–120.
- Jacobus, EH., Kindangen, P., Walewangko, EN. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(07), 1-16.
- Jalan, J., Ravallion, M. (1998). Transient Poverty in Post-Reform China. *Journal of Comp. Econom*, 6, 338-357.
- Jumirah & Wahyuni, H. (2018). The Effect of Social Capital on Welfare in Indonesia. *Journal of Indonesia Economy and Business*, 33(01), 65-76.



- Kurniawan, Mohd. (2017). Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Sungai Lilin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01), 16-20
- Lekobane, R. and Seleka, B. (2017). Determinants of Household Welfare and Poverty in Botswana, 2002/2003 and 2009/2010. *Journal of Poverty*, 21(1), 42-60.
- Litchfield, J. and McGregor, T. (2008). *Poverty in Kagera, Tanzania: Characteristics, causes and constraints*. (PRUS Working Paper No.42). Brighton, England: University of Sussex.
- Mai, Tung & Mahadevan, Renuka. (2016). A Research Note on the Poverty Dynamics and Cost of Poverty Inequality: Case Study of Indonesia. *Journal of Economic Analysis and Policy*, 49, 100-107.
- Nalle, Frederic W & Kiha, Emilia K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 1(3), 35-45.
- Obeng-Odoom, F., (2013). Governance for Pro-poor Urban Development: Lessons from Ghana. *Routledge Journal*, London (First, p. 258).
- Prokopenko, M.V., Holden, M.P. (2001). Financial Development and Poverty Alleviation: Issues and Policy Implications for Developing and Transition Countries. *International Monetary Fund*, 1-160
- RAND. (2014). Indonesia Family life Survey 5. Retrieved by <https://www.rand.org/well-being/social-and-behavioral-policy/data/FLS/IFLS.html> on september 2, 2019 (time 01.00 PM).
- Ravallion, M., & Wodon, Q. (1999). *Poor Areas, Or Only Poor People?*. *Journal of Regional Science*, 39(4), 689–711.
- Shepherd, A. (2011). *Tackling Chronic Poverty: The Policy Implications of Research on Chronic Poverty and Poverty Dynamics*. Chronic Poverty Research Centre. UK.
- Sekhampu, T. S. (2013). Determinants of poverty in South African township. *Journal of Social Sciences*, 34(2), 145–153.
- Skoufias, E., & Katayama, R. (2011). The sources of welfare disparities between and within regions of Brazil: Evidence from the 2002–03 Household Budget Survey (POF). *Journal of Economic Geography*, 11(5), 897–918.
- Skoufias, Emmanuel., Olivieri, Sergio. (2013). Sources of Spatial Welfare Disparities in Indonesia : Household Endowments or returns?. *Journal of Asian Economics*, 29, 62-79.
- Woldridge, Jeffrey M. (2016). *Introductory Econometrics – A Modern Approach*. Michigan University: United State of America
- Zuhdiyaty, Noor., Kaluge David. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *JIBEKA*, 11(02), 27-31.